

Pemberdayaan Pekerja Migran melalui Program Desa Migran Produktif di Banyumas, Indonesia

Muslihudin ^{1,*}, , Tyas Retno Wulan ¹, , Tri Sugiarto ¹, ,
Sotyania Wardhianna ², , dan Sri Wijayanti ³, 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

² Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

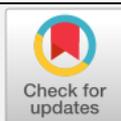
³ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, 53122, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

* Korespondensi: muslihudin1963@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2021). Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia. *Society*, 9(1), 319-330.

DOI: [10.33019/society.v9i1.261](https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Banyumas. Desmigratif merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 2016. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran dimulai dari desa. Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dengan menggunakan model kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu menggali data untuk mendapatkan makna dari hal-hal yang mendasar dan esensial dari fenomena empiris yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian adalah 1). Dalam memberikan informasi tentang proses pekerja migran menghadapi tantangan dari agen perekrutan/perusahaan perekrutan (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). 2). Dalam tahapan proses produksi, terdapat kendala peralatan yang disediakan Kementerian tidak bisa digunakan. 3). Pengasuhan anak BMI masih bersifat individual hanya kepada keluarganya. Masyarakat bahkan masih menstigmatisasi mereka sebagai anak yang pantas mendapat masalah karena ditinggalkan oleh orang tuanya. 4). Inisiasi pembentukan koperasi buruh migran yang terlambat. Diperlukan prosedur pembentukan koperasi pekerja migran, pendampingan, dan pembinaan khusus terkait pekerja migran.

Dikirim: 11 November, 2020;
Diterima: 4 Maret, 2021;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;

Kata Kunci: Desa Migran Produktif; Pekerja Migran;
Pemberdayaan

1. Pendahuluan

Pemberdayaan ekonomi rumah tangga merupakan titik awal untuk memajukan kesejahteraan masyarakat (Lestari *et al.*, 2019). Program Desa Migran produktif (Desmigratif) digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2016 untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan, dan melindungi Pekerja Migran Indonesia dari desa. Desa Migran Produktif mengembangkan empat pilar utama: 1. menyediakan informasi tentang layanan migrasi kota yang aman; 2. Meningkatkan upaya produktif Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; 3. Komunitas *parenting* aktif bagi anak Pekerja Migran Indonesia yang tinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri; dan 4. Penguatan usaha produktif jangka panjang melalui koperasi.

Program Desa Migran Produktif diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, mengingat masih tingginya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2015, berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), ada 6,5 Juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di 142 negara di dunia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai bagi Pekerja Migran Indonesia. Pada tahun 2013, berdasarkan data Crisis Center BP2MI, sedikitnya 13 ribu kasus menimpa Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara, 300 di antaranya terancam hukuman mati.

Selain itu, kasus di negara tujuan, investigasi berdasarkan Wulan *et al.* (2016), Muslihudin *et al.* (2019; 2020) permasalahan mendasar yang dialami Pekerja Migran Indonesia meliputi tiga isu utama berikut ini, yaitu: melimpahnya hak-hak dasar anak yang ditinggalkan (*Children "Left Behind"*) atau CLB. Ketidakamanan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang berimplikasi pada perceraian dan lemahnya kemampuan pengelolaan remitansi ekonomi hasil bekerja di luar negeri. Desa Migran Produktif berfokus pada empat pilar: keamanan informasi migrasi, bisnis produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga, komunitas pengasuhan anak Pekerja Migran Indonesia, dan pembentukan koperasi untuk jangka panjang secara konseptual bermanfaat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini program pemerintah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak bersifat komprehensif dan integratif seperti ini, tetapi lebih berupa program tata ruang dan tidak berkelanjutan, lebih kepada penanganan kasus, bukan pencegahan.

Pada tahun 2016, Desa Migran Produktif dilaksanakan di dua wilayah percontohan di Indonesia, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 telah terbentuk 120 Desa Migran Produktif yang meliputi 100 desa di 50 kabupaten/kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dua desa di Kabupaten Banyumas yaitu Desa Losari, Rawalo Kecamatan, dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar.

Desa merupakan representasi terkecil dari negara yang berhubungan langsung dengan warga. Kota juga merupakan kolektif otonom yang memobilisasi dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, desa seharusnya menjadi titik awal perlindungan bagi WNI yang akan pergi ke luar negeri. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi warga desa

yang bermigrasi belum aktif memberikan pelayanan seperti tidak adanya database Pekerja Migran Indonesia yang valid dari desa dan hanya memberikan surat izin dari calon suami atau istri atau orang tua Pekerja Migran Indonesia. Jika sponsor/perantara meminta surat dari desa, bahkan perangkat desa atau bahkan kepala desa merangkap sebagai makelar (Hidayah & Susilo, 2016; Wulan et al., 2016).

Penelitian lain sebelumnya adalah Rosiyanti & Gustaman (2020) tentang pemberdayaan mantan pekerja migran perempuan di Desa Purworejo Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan mantan pekerja migran perempuan di desa hanya sebatas pada tingkat partisipasi. Artinya belum menghasilkan masyarakat yang berdaya seperti yang diharapkan. Artinya masih dalam tahap awal yang perlu didampingi dan didorong terus menerus. Program deskriptif meliputi empat kegiatan, yaitu memasak, membuat kain batik, menjahit, dan merajut.

Demikian pula Nuraeini (2018) dalam penelitiannya tentang program desa migran produktif, menyimpulkan bahwa sebagian besar dari 111 desa sampel memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Untuk mensukseskan program desa migran produktif, diperlukan strategi untuk mengintegrasikan program lintas Kementerian/Lembaga mengikuti program prioritas nasional. Mengoptimalkan keberadaan mitra lokal yang mau bekerja sama mensukseskan program desa migran produktif menjadi kunci utama dalam mengembangkan UMKM berbasis agroindustri pada Pekerja Migran Indonesia.

Peneliti lain yang telah mengkaji implementasi program desa migran produktif adalah Mindarti & Nabil (2019) dan Bastaman et al. (2020). Mereka menyimpulkan bahwa pemberdayaan migran produktif belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Bentuk program yang belum berhasil adalah hasil yang belum optimal. Pelaksanaan program yang tidak efektif meliputi ketepatan waktu, sumber daya manusia, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, penyaluran dana yang benar, tidak ada penyimpangan, pemantauan, dan evaluasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan dan hambatan dalam pemberdayaan melalui program desa migran produktif khususnya di Kabupaten Banyumas. Identifikasi keberhasilan dan hambatan akan membantu mewujudkan program-program yang akan dilakukan di desa lain. Berbagai jenis penelitian tentang pemberdayaan telah dilakukan, namun program pemberdayaan desa migran produktif belum pernah ada, khususnya di Kabupaten Banyumas. Itulah mengapa penelitian penting untuk dilakukan.

2. Metodologi Penelitian

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan paradigma konstruktivis, namun penelitian ini juga menggunakan model kritis. Salim (2013) menjelaskan bahwa paradigma konstruktif mengungkapkan detail budaya masyarakat tertentu dengan memahami setting budayanya secara alami dengan sudut pandang subjek yang diteliti, sehingga penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Konsekuensi metodologis dari pilihan paradigma ini adalah menggunakan metodologi kualitatif. Jenis pendekatannya adalah fenomenologis, yaitu menggali data untuk mendapatkan makna dari hal-hal yang mendasar dan esensial dari fenomena empiris dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian.

2.1. Subjek Penelitian

Sasaran utama penelitian ini adalah aparat pemerintah desa, aparat tenaga kerja, dan pendamping desa untuk program migran produktif. Informan pendukung adalah mantan

pekerja migran Indonesia yang aktif dalam program desa migran produktif. Penentuan subjek penelitian bersifat *purposive*, mengingat mereka yang mengetahui dan terlibat dalam program desa migran produktif.

Jumlah informan yang dijadikan subjek penelitian adalah sebagai berikut: 1) dua kepala desa; 2) dua orang pendamping program desa migran produktif di Desa Cihonje, dan dua orang di Desa Losari, sehingga ada empat orang; 3) ada 20 orang anggota pokja desa migran produktif di Desa Cihonje dan 20 orang di Desa Losari, seluruhnya 40 orang; 4) dua orang pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas. Dengan demikian jumlah informan seluruhnya adalah 48 orang.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara mendalam, yaitu berupa dialog, baik secara individu maupun kolektif dengan pemerintah desa, dan melakukan observasi yang terlibat (observasi partisipatif) untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendalam. Teknik pengumpulan data lainnya adalah FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terfokus terbatas untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari informan. Selain itu juga dilakukan proses pembelajaran kolaboratif antara peneliti dengan informan dan upaya sosialisasi hasil penelitian sementara dengan informan dalam pelatihan. Pada saat yang sama, data sekunder dari Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai data sekunder lainnya tersedia untuk digunakan secara empiris.

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, dan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Kedua lokasi tersebut menjadi subjek penelitian karena kedua desa tersebut merupakan percontohan program desa migran produktif di Kabupaten Banyumas. Kedua desa tersebut dijadikan percontohan program desa migran produktif karena jumlah Pekerja Migran Indonesia terbanyak di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan dalam dua tahap; tahap pertama pada 2018, dari Februari 2018 hingga Desember. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2019.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Pekerja Migran Indonesia

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pengirim Pekerja Migran Indonesia terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BP2MI tahun 2016, Banyumas menduduki peringkat 16 dari 25 kabupaten pengirim Pekerja Migran Indonesia terbanyak di Indonesia dan peringkat keempat di Jawa Tengah setelah Cilacap, Kendal, dan Brebes. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia berarti devisa yang diperoleh juga signifikan. Prihatinah *et al.* (2012) menyatakan bahwa pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas. Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten pengirim Pekerja Migran Indonesia terbesar di Jawa Tengah menerima perdagangan internasional sebesar Rp372 miliar pada 2009. Jumlah ini tiga kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp105 miliar.

Data Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyumas yang berangkat ke luar negeri cukup banyak. Ilustrasi data pengiriman Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Banyumas tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia dalam kurun waktu satu tahun mencapai 2.657 orang. Pekerja perempuan sebanyak 2.274 (85,59) persen, sedangkan pekerja laki-laki hanya 383 orang atau 14,41 persen. Besarnya

porsi pekerja migran perempuan dari laki-laki membuat masalah keluarga lebih kompleks daripada pekerja laki-laki yang terlantar. Setidaknya ada masalah pola asuh bagi anak Pekerja Migran Indonesia, terutama bagi balita. Untuk itu, pilar program desa migran produktif ketiga tentang *community parenting* menjadi penting.

Tabel 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Banyumas Tahun 2017

No.	NEGARA PENEMPATAN	INFORMAL			FORMAL			TOTAL
		F	M	Σ	F	M	Σ	
1	Brunei Darussalam	5	0	5	1	2	3	8
2	Hong Kong	516	0	516	0	0	0	516
3	Japan	0	0	0	3	3	6	6
4	Korea South	0	0	0	38	215	253	253
5	Malaysia	242	1	243	319	74	393	636
6	Qatar	0	0	0	0	1	1	1
7	Singapore	435	0	435	0	0	0	435
8	Taiwan	702	2	704	13	78	91	796
9	United Arab Emirates	0	0	0	0	7	7	7
	Total	1900	3	1903	374	380	754	2657

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2017)

Tabel 1 menunjukkan bahwa keberangkatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur informal atau dikelola swasta jauh lebih banyak daripada melalui jalur formal atau dikelola oleh pemerintah. Perbandingannya adalah 903 orang atau 71,62 persen dibandingkan 754 orang atau 28,38 persen. Menurut [Ratnaningsih \(2017\)](#), hal tersebut merupakan pola lama yang sudah tidak relevan lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ([Republik Indonesia, 2017](#)). Seharusnya pemerintah lebih dominan dalam mengelola Pekerja Migran Indonesia dibandingkan swasta.

Tabel 2 menginformasikan bahwa Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyumas tergolong berpendidikan sangat rendah, dengan pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 921 orang atau 34,66 persen, Sekolah Menengah Pertama juga sebanyak 921 atau 34,66 persen. Sebagai perbandingan, mereka yang berpendidikan tinggi hanya 20 orang atau 0,75 persen. Rendahnya tingkat pendidikan, bagaimanapun, mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. [Latifah et al. \(2016\)](#) menyatakan bahwa salah satu kendala pemberdayaan mantan Pekerja Migran Indonesia adalah rendahnya kualitas dukungan.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia Banyumas Tahun 2017

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	INFORMAL			FORMAL			TOTAL
		F	M	JML	F	M	JML	
1	Sekolah Dasar	877	1	878	9	34	43	921
2	Sekolah Menengah Pertama	644	0	644	179	98	277	921
3	Sekolah Menengah Atas	273	2	275	109	217	326	601
4	Sekolah Menengah Kejuruan	104	0	104	66	24	90	194
5	Diploma	2	0	2	9	5	14	16
6	Sarjana	0	0	0	2	2	4	4
TOTAL		1900	3	1903	374	380	754	2657

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2017)

Rendahnya pendidikan Pekerja Migran Indonesia menjadi tantangan untuk mendukung keinginan pemerintah agar proporsi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak bertambah. [Bareta & Ispriyarso \(2018\)](#) menyatakan bahwa keinginan atau target pertumbuhan nol pemerintah dari pembantu rumah tangga. Dengan rendahnya pendidikan Pekerja Migran Indonesia tampaknya tidak mudah untuk memenuhi keinginan pekerja rumah tangga, dan bukan merupakan pilihan yang dapat menerima mereka untuk bekerja di luar negeri.

[Atmaja \(2014\)](#) menyatakan bahwa salah satu akar penyebab pekerja migran adalah ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan sumber daya manusia yang tersedia. Dari masalah pengangguran terlihat bahwa pengangguran terdidik masih memiliki jumlah yang cukup besar. Pengangguran dengan tingkat pendidikan sampai SMA akan berpikir dua kali untuk memperjuangkan pekerjaan. Masalah ini dua kali lipat dengan masalah kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam kehadiran Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Tingkat pekerjaan dan pendapatan yang cukup tinggi menjadi daya tarik utama para pekerja migran ini.

3.2. Hambatan Desa Migran Produktif

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang muncul dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Kabupaten Banyumas terlihat pada setiap program.

3.2.1. Menyediakan Informasi dan Layanan Migrasi

Pemerintah berkewajiban memfasilitasi migrasi dan mobilitas penduduk yang tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melaksanakan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik ([Hidayati, 2019](#)). Melalui pusat layanan informasi ketenagakerjaan dan migrasi, penduduk desa yang ingin bekerja di dalam dan luar negeri mendapatkan informasi pasar kerja dan bimbingan/penyuluhan kerja (yaitu, informasi melalui pelatihan). Informasi tata cara menjadi Pekerja Migran Indonesia sesuai prosedur, dan

pelayanan pembuatan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia sebagai syarat pembuatan paspor (seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan, dan dokumen lainnya) dilakukan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa. Pusat layanan ini juga bekerja untuk membantu menyelesaikan masalah pekerja migran dengan memberikan referensi kepada pihak yang berwenang (misalnya, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), atau LSM).

Program unggulan ini tidak serta merta mudah diwujudkan di lapangan. Desa Migran Produktif di Desa Losari dan Desa Cihonje yang sudah berjalan hampir dua tahun, pembentukan database BMI baik yang aktif di luar negeri maupun yang sudah kembali terus berlanjut. Artinya, data primer untuk identifikasi saja belum lengkap, apalagi untuk membantu di tingkat yang lebih rumit. Kondisi ini terjadi karena kurangnya kuantitas dan kualitas desa migran produktif, terutama mengenai penelitian atau pendataan, didukung oleh kurangnya data sekunder di Desa Migran Produktif.

Kendala yang tidak kalah penting adalah eksternal. Kendala eksternal tersebut adalah institusi seperti Agen Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang dulu dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Program kampung migran produktif pertama ini menyebabkan penyelenggaraan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah berhadapan dengan kepentingan institusi swasta. Dalam memberikan informasi tentang proses pekerja migran menghadapi tantangan dari pemasok tenaga kerja individu.

Tentang perlindungan BMI, desa seharusnya menjadi pintu masuk perlindungan bagi WNI yang akan pergi ke luar negeri. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi warga desa yang bermigrasi belum aktif memberikan pelayanan seperti tidak adanya database Pekerja Migran Indonesia yang valid dari desa dan hanya memberikan surat izin dari calon suami atau istri atau orang tua Pekerja Migran Indonesia. Jika sponsor/perantara meminta surat dari desa, bahkan perangkat desa atau bahkan kepala desa merangkap sebagai calo (Hidayah & Susilo, 2016; Wulan et al., 2016). Kondisi ini ditegaskan oleh Kolopaking (2016), dalam penelitiannya di desa Tugu Selatan Cisarua, desa tujuan para pendatang dari Timur Tengah. Pemerintah desa hanya berorientasi memberikan pelayanan kepada pendatang tanpa perencanaan yang mengakomodir kepentingan warga desa.

3.2.2. Mengembangkan Bisnis Produktif

Mereka membantu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mengembangkan keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha produktif melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga pemasaran.

Dalam merealisasikan program kedua desa migran produktif ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa tampak kurang cermat membaca peluang, kebutuhan, dan kendala yang dialami kelompok usaha mandiri desa migran produktif di dua daerah percontohan. Hal ini terlihat dari bantuan alat produksi pada kelompok eks BMI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga seperangkat alat tersebut hanya disimpan di kantor/rumah belajar desa migran produktif. Kasus seperti ini sering terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah yang bersifat *top-down planning* dan *project-oriented* saja.

Kendala selanjutnya adalah terbatasnya pemasaran hasil usaha yang disebabkan oleh kurangnya jaringan pemasaran. Hasil produksi juga tidak layak bersaing dengan produk yang sudah berjalan dan menguasai pasar. Misalnya kemasannya sederhana, tidak ada keterangan tanggal kadaluarsa, izin juga tidak tersedia, dan komposisi bahan. Kendala program di kedua

desa migran produktif tersebut tampaknya membutuhkan sentuhan jiwa wirausaha. Pelatihan atau transmisi kewirausahaan kepada mantan Pekerja Migran Indonesia dan fasilitator harus diperkuat untuk menjadi pemimpin di desa migran produktif. Hasil penelitian *Astuti et al. (2019)* dan *Cipta (2019)* menyimpulkan bahwa jiwa wirausaha perlu ditanamkan kepada masyarakat bahkan sejak dini dan dijadikan budaya lokal.

Senada dengan hasil penelitian ini, *Nuraeni (2018)* menyimpulkan bahwa Program Desa Migran Produktif khususnya pilar 2 (pengembangan usaha produktif) dan komponen 4 (pengembangan Koperasi Program Desa Migran Produktif), sangat strategis untuk mendukung masyarakat lokal mengembangkan UMKM berbasis agroindustri. Hal itu berdasarkan survei dominan pertanian/perkebunan dan perikanan dan agroindustri yang digagas oleh banyak masyarakat lokal, yaitu industri makanan/minuman dari berbagai komoditas unggulan dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

3.2.3. Memfasilitasi Terbentuknya Komunitas Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak (Community Parenting)

Program ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia di luar negeri memiliki anak yang ditinggalkan di kampung halamannya. *Reni et al. (2016)* menunjukkan bahwa status perkawinan negatif dan signifikan, artinya probabilitas Pekerja Migran Indonesia menikah memutuskan untuk bermigrasi lebih tinggi daripada kemungkinan responden yang belum menikah. Sehingga terlihat bahwa status perkawinan responden mempengaruhi kesempatan untuk memutuskan bermigrasi. Bagi seseorang yang terikat perkawinan, maka beban hidup yang ditanggung akan bertambah. Demikian pula ketergantungan keluarga bertanda negatif dan signifikan, artinya probabilitas responden yang memiliki tanggung jawab yang sama yaitu 3 orang atau tiga jiwa per keluarga dalam memutuskan untuk bermigrasi lebih kecil daripada kemungkinan responden memiliki beban 3 orang per keluarga di daerah asalnya. Sehingga terlihat bahwa beban keluarga mempengaruhi kesempatan untuk bermigrasi, menurut jumlah tanggungan keluarga responden di daerah asal antara 1 sampai dengan 6 orang.

Demikian pula *Prasetyo (2017)* yang mengkaji kondisi psikologis anak dalam keluarga migran menyimpulkan bahwa keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat masih perlu mempertimbangkan dampak dari fenomena migrasi. Komitmen dan komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam mengasuh anak dalam keluarga migran. Ditambah lagi, jika melihat permasalahan yang muncul dari kehadiran ibu-ibu yang bermigrasi, ternyata lebih dari sekedar dampak positifnya. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam bermigrasi tetap harus memperhatikan kondisi psikologis anak sebagai prioritas utama dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, mungkin program tersebut mendorong munculnya komunitas-komunitas yang membantu dalam membentuk komunitas yang tugasnya membimbing keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam hal mendidik, mengasuh, dan membimbing anak secara benar dan memadai. Anak-anak Pekerja Migran Indonesia diasuh bersama oleh masyarakat melalui kegiatan ini di sebuah pusat belajar mengajar yang disebut "rumah belajar", sebuah desa migran produktif. Orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membimbing anak secara benar dan memadai untuk melanjutkan sekolah hingga lulus dan mengembangkan kreativitasnya.

Dalam melaksanakan program ketiga desa migran produktif, kendala yang masih ada adalah pengasuhan anak pekerja migran selama ini, dan mereka masih individu hanya untuk keluarga. Masyarakat bahkan menstigma bahwa mereka pantas direpotkan sebagai anak

Pekerja Migran Indonesia karena ditinggal orang tuanya. Pemerintah kota belum disebut bertanggung jawab untuk menggantikan peran orang tua yang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Solidaritas sosial belum terjalin, terutama menyangkut anak-anak yang ditinggalkan ibu atau ayahnya untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Apalagi jika suami/istri yang ditinggalkan pasangannya untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia mencari pasangan lagi. Kasus seperti ini membuat masyarakat atau tetangga semakin acuh dan memperkuat stigma di atas.

Lailiyah (2018) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa secara umum kendala yang muncul dalam pengasuhan anak adalah sosok ibu yang kesulitan dalam berperan sebagai ayah dan proses penyesuaian diri dari pengasuh dan anak serta hal-hal yang mempengaruhi asuhan yang dilakukan oleh *caregiver* adalah; 1. Anak-anak yang diasuh oleh ibu kandungnya ketika ayahnya bekerja sebagai pekerja migran lebih memilih pengasuhan otoritatif; 2. Anak yang diasuh oleh bibinya ketika ibu kandungnya bekerja sebagai pekerja migran lebih memilih mengasuh anak dengan cara memanjakan yang permisif; 3. Ketika kedua orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran, anak yang diasuh oleh kerabat jauh memiliki kombinasi pengasuhan yang dilakukan secara otoritatif oleh kerabatnya dan ketidakpedulian yang permisif oleh orang tua kandungnya.

Pelaksanaan program bimbingan yang berjalan masih sebatas pemberian mata kuliah yang berkaitan dengan mata pelajaran kemahasiswaan, misalnya mata kuliah bahasa Inggris, matematika, re-sitasi. Idealnya, program tersebut harus diintegrasikan ke dalam penanganan anak pekerja migran, tetapi tidak mudah untuk mewujudkannya.

3.2.4. Memfasilitasi Pendirian dan Pengembangan Koperasi

Mendirikan dan mengembangkan koperasi yang bertujuan untuk memperkuat usaha-usaha produktif masyarakat dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan keempat program tersebut, tercapai pembentukan organisasi koperasi. Tidak ada indikasi pembentukan koperasi. Namun, keanggotaan yang solid dalam kelompok Pekerja Migran Indonesia adalah modal yang kuat untuk menjadi koperasi. Hanya saja tidak ada pendorong dan pembawa menuju koperasi yang sesungguhnya. Mantan Pekerja Migran Indonesia juga tidak merasa bahwa koperasi merupakan kebutuhan yang mendesak. Pada saat yang sama, koperasi merupakan salah satu modal sosial yang penting bagi kemajuan suatu masyarakat. Dengan kerjasama internal dan eksternal yang inklusif dengan membangun lebih banyak jaringan dengan potensi eksternal yang melekat padanya, maka masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses (Laura *et al.* 2018).

Kondisi koperasi yang kurang baik muncul dan berkembang mungkin karena tercemarnya makna organisasi, sebagaimana disimpulkan oleh Rochmadi (2011) bahwa berbagai masalah yang berkembang mengenai keberadaan organisasi, khususnya koperasi simpan pinjam, terkait dengan nilai dan prinsip budaya yang dipersepsikan. Sebagai soko guru perekonomian bangsa, koperasi bukan lagi koperasi sebagai organisasi massa rakyat dan bukan lagi koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Fenomena masih banyaknya koperasi "hitam" yang saat ini beroperasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur meresahkan masyarakat. Globalisasi ekonomi berdampak buruk bagi perkembangan dunia perkoperasian di Indonesia. Telah terjadi pergeseran prinsip, prinsip, dan tujuan organisasi yang bergeser terlihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perubahan, pada tahun 2009 sebesar 34,24%; Pada tahun 2010 sebesar 43,83, dan pada tahun 2011 sebesar 44,74%.

Jika program pembentukan koperasi harus berhasil, maka diperlukan pendidikan tentang koperasi, tata cara pendirian organisasi, kondisi, prospek, manfaat, dan sebagainya.

Pengkondisian mantan Pekerja Migran Indonesia tentang pentingnya koperasi bagi mereka perlu dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan buku khusus tentang teknologi tepat guna terkait pekerja migran serta pelatihan dan pendampingan intensif dari koperasi ahli.

4. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat dalam program desa migran produktif di Kabupaten Banyumas secara konseptual hingga program yang diluncurkan sudah cukup baik. Dalam arti program usaha produktif didasarkan pada potensi yang ada di lingkungan desa masing-masing. Program utama yang dicanangkan pemerintah pusat, yang terdiri dari 4 pilar, yaitu: pembuatan database dan informasi Pekerja Migran Indonesia, usaha produktif, pengasuhan anak, dan pembentukan koperasi, semuanya sudah berjalan. Program usaha produktif mendapat respon paling besar dari masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi.

Kendala tersebut berkaitan dengan kondisi kelompok kerja desa migran produktif itu sendiri dan permasalahan yang terkait dengan pemerintah. Kondisi kelompok kerja masih minim pengetahuan, kewirausahaan, dan keterampilan yang masih kurang. Masalah yang terkait dengan pemerintah adalah adanya bantuan peralatan untuk usaha produktif yang tidak digunakan oleh pokja sama sekali karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Saran yang dapat ditawarkan dari kesimpulan di atas adalah perlu adanya pemantauan yang berkesinambungan dari dinas tenaga kerja dan pelatihan bagi anggota administrasi terkait dengan keterampilan dalam usaha produktifnya. Selain itu, pemberian bantuan peralatan untuk menunjang usaha produktif dari pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan riil masing-masing desa agar bermanfaat dan tidak mandek.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang telah mendanai penelitian ini, dengan Surat Keputusan No. 62/UN23.6/KP.02.01/2019 dan Nomor Perjanjian/Kontrak P/289/UN23/14/PN/2019. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kepala Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada petugas pendamping dan anggota program desa migran produktif di dua desa yaitu Desa Cihonje dan Desa Losari yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. P., Bahtera, N. I., & Atmaja, E. J. J. (2019). Entrepreneurial Characteristics and Behaviors of Muntok White Pepper Farmers. *Society*, 7(2), 101-115. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.116>
- Atmaja, H. T. (2014). Keberadaan Keluarga TKW Jawa Timur Berbasis Arena Produksi Kultural. *Forum Ilmu Sosial*, 41(1), 1-14. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5375/4300>

- Bareta, R. D., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 163–182. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 169–191. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.928>
- Cipta, H. (2019). Determinant Factors of Entrepreneurial Spirits among the Minangkabau Migrant Merchants. *Society*, 7(2), 233–250. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.110>
- Hidayati, I. (2019). The Process of Migration and Communication Technology Roles among Labor Migrants in Batam - Indonesia. *Society*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.99>
- Hidayah A., & Susilo, W. (2016). Building a Village Caring for Migrant Workers. Migrant Care Jakarta.
- Kolopaking, L. M. (2016). Migrasi Gaya Hidup Internasional dan Peminggiran Masyarakat di Desa Tujuan Wisata (Studi di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14405>
- Lailiyah, F. (2018). *Problematika Pengasuhan Anak pada Keluarga TKI (Studi di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)* (Thesis). Universitas Airlang. Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/72465/>
- Latifah, S. W., Waluya, A. J., & Retna, E. R. (2016). Pemberdayaan Mantan TKI melalui Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2(1), 67-80.
- Laura, N., Sari, R. D., Setiawan, I., & Herdiyanti, H. (2018). Peran Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Alam Sebagai Strategi Bertahan Hidup di Dusun Limang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. *Society*, 6(2), 74–82. <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.68>
- Lestari, W., Kartono, D. T., Demartoto, A., & Setiyawan, K. B. (2019). The Empowerment of Households towards Independence through Social Capital in Program Keluarga Harapan (PKH). *Society*, 7(2), 268–280. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124>
- Mindarti, L. I., & Nabil, P. (2019). Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang). *Public Administration Journal of Research*, 1(4), 421-435. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i4.26>
- Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2019). Integration of Human Resources and the Environment on Productive Migrant Village Programs in Banyumas Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 125, 09014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912509014>
- Muslihudin, M., Wulan, T. R., Sugiarto, T., Wardhianna, S., & Wijayanti, S. (2020). Initial Implementation of Productive Migrant Village (PMV) Programs in Banyumas Central Java Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 86, 01050. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601050>
- Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 42-53.

- Prasetyo, D. T. (2017). Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran : Sebuah Studi Literatur. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(2), 58–61. <https://doi.org/10.21009/jkkp.042.01>
- Prihatinah, T., Asyik, N., & Kartono, K. (2012). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 312-320. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55>
- Ratnaningsih, E. (2017, December 31). Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>
- Reni, R., Tarmizi, N., & Maryadi, M. (2016). Analisis Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Asal Kabupaten Ogan Ilir Ke Malaysia. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 74-85.. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1025>
- Rosiyanti, A., & Gustaman, F. A. (2020). Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 978-989. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/39910>
- Rochmadi, I. (2011). Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. *Jurnal Ekonomika*, 4(2), 45-51.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Salim, A. (2013). Management Information in Rural Area: A Case Study of Rancasalak Village in Garut, Indonesia. *Procedia Technology*, 11, 243–249. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.187>
- Wulan, T. R., Wijayanti, S., Shodiq, D., & Ramadhanti, W. (2016). Village as a Basic of Safe Migration: The Enforcement of Head of Village and Local Regulation (Perdes) as a Strategy to prevent Human Trafficking in Banyumas Central Java. *Proceedings of the 2016 International Conference on Public Management (ICPM 2016)*. Published. <https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.23>

Tentang Penulis

1. **Muslihudin** memperoleh gelar Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Diponegoro, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: muslihudin1963@yahoo.com
2. **Tyas Retno Wulan** memperoleh gelar Doktor dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 2010. Penulis adalah dosen dan Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
Email: tyashzul@yahoo.com

3. **Tri Sugiarto** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1994. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman..
Email: trisugiarto12@gmail.com
4. **Sotyania Wardhianna** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1998. Penulis adalah dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: anna.inoel228@gmail.com
5. **Sri Wijayanti** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2007. Penulis adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.
E-Mail: yantietaslim@yahoo.com